

Perencanaan Partisipatif Pengembangan Produk Unggulan Desa Jatisaba Melalui Pendekatan Participatory Rural Appraisal

¹⁾Sunendar Sunendar*, ²⁾Muhamad Solekan, ³⁾Dian Novitasari, ⁴⁾Budiyoko Budiyoko, ⁵⁾Lu'lu'ul Uyuni

^{1,2,5)}D3 Agribisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

³⁾S1 Teknik Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

⁴⁾S1 Agribisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

Email Corresponding Author: sunendar@unsoed.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Daya Saing Produk
Kelompok Wanita Tani
Ovop
Participatory Rural Appraisal
Perencanaan Partisipatif

Kelompok Wanita Tani (KWT) Subur Makmur di Desa Jatisaba, Kabupaten Purbalingga, memproduksi keripik sagu tempe sebagai produk unggulan desa dalam kerangka *one village one product*, namun menghadapi keterbatasan kapasitas produksi akibat proses manual, standar mutu dan keamanan pangan yang belum memadai, serta branding produk yang belum kuat. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan penerapan pendekatan *participatory rural appraisal* dalam tahap perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada proses identifikasi permasalahan dan perumusan solusi secara partisipatif. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan tim pengabdian, anggota KWT Subur Makmur, perangkat Pemerintah Desa Jatisaba, dan penyuluh pertanian lapangan (PPL), melalui teknik penajakan awal, diskusi kelompok terfokus, penelusuran alur produksi, wawancara semi-terstruktur, serta pemeringkatan masalah secara musyawarah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa proses partisipatif tersebut berhasil merumuskan tiga permasalahan prioritas, yaitu rendahnya kapasitas produksi, lemahnya kapasitas kelembagaan dan standar mutu, serta lemahnya branding produk, yang masing-masing ditindaklanjuti dengan solusi berupa penerapan paket teknologi tepat guna, pelatihan dan pendampingan keamanan pangan serta sertifikasi produk, dan pendampingan perbaikan kemasan dan merek. Pelibatan mitra sejak tahap perencanaan terbukti menghasilkan rumusan kegiatan yang lebih kontekstual sekaligus menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki anggota KWT terhadap program. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan PRA berperan penting sebagai fondasi perencanaan yang menentukan ketepatan arah dan keberlanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

ABSTRACT

Keywords:

OVOP
Participatory Rural Appraisal
Participatory Planning
Product Competitiveness
Women Farmers Group

The Subur Makmur Women Farmers Group (KWT) in Jatisaba Village, Purbalingga Regency, produces sago-tempeh chips as the village's flagship product under the one village one product framework, yet faces constraints in production capacity due to manual processing, inadequate quality and food safety standards, and weak product branding. This article aims to describe the application of the participatory rural appraisal approach in the planning stage of a community service program, specifically in the participatory identification of problems and formulation of solutions. The activity involved the service team, members of KWT Subur Makmur, Jatisaba Village government officials, and agricultural extension workers (PPL), employing techniques such as initial rapport building, focus group discussions, production-process mapping, semi-structured interviews, and consensus-based problem ranking. The results show that this participatory process successfully identified three priority problems, low production capacity, inadequate institutional capacity and quality standards, and weak product branding, each of which was addressed through corresponding solutions: the application of an integrated appropriate technology package, training and mentoring in food safety and product certification, and assistance in packaging and brand redesign. Engaging the partners from the planning stage produced a more contextually grounded program design while also fostering awareness and a sense of belonging among KWT members toward the planned activities. It is concluded that the PRA approach plays a crucial role as a planning foundation that determines both the accuracy and the sustainability of community service programs.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Kelompok Wanita Tani (KWT) merupakan salah satu wadah pemberdayaan ekonomi perempuan di pedesaan yang berperan penting dalam menopang kesejahteraan keluarga, sekaligus menjadi ruang belajar dan berbagi pengetahuan bagi anggotanya (Nurhalimah & Damayanti, 2025; Soewito et al., 2022). Melalui KWT, perempuan desa tidak hanya berperan sebagai pendamping ekonomi keluarga, tetapi juga sebagai pelaku usaha yang mengelola potensi sumber daya lokal secara kolektif dan berkelanjutan (Sunu & Supartiwi, 2025). Salah satu KWT yang aktif mengembangkan potensi tersebut adalah KWT Subur Makmur di Desa Jatisaba, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, dengan produk unggulannya berupa keripik sagu tempe, yaitu olahan berbahan dasar sagu singkong dan tempe yang telah menjadi bagian dari kekayaan kuliner lokal.

Potensi keripik sagu tempe sebagai produk khas Desa Jatisaba mendorong Pemerintah Desa untuk menjadikannya sebagai produk unggulan desa, sejalan dengan kebijakan *one village one product* (OVOP) yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Kebijakan OVOP pada dasarnya merupakan gerakan revitalisasi ekonomi lokal yang mendorong setiap desa menghasilkan produk khas dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di wilayahnya (Kemenkop UKM & Japan ASEAN Cooperation, 2014), dan telah terbukti mampu menggerakkan aktivitas ekonomi perdesaan di berbagai daerah (Ningtyas & Indah, 2022; Turmudi, 2025). Namun demikian, tingginya permintaan pasar terhadap keripik sagu tempe belum dapat diimbangi dengan kapasitas produksi KWT Subur Makmur yang masih terbatas. Proses produksi yang sepenuhnya bergantung pada tenaga manual, mulai dari pemotongan, penggorengan, penirisan, hingga pengemasan, menyebabkan hasil produksi tidak konsisten dari sisi mutu maupun kuantitas. Kondisi ini diperparah oleh belum adanya standar keamanan pangan, sertifikasi produk (halal dan PIRT), serta identitas kemasan dan merek yang mampu meningkatkan daya saing produk di pasar yang lebih luas.

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan daya saing keripik sagu tempe tidak dapat diselesaikan hanya dengan pengadaan alat atau pelatihan yang dirancang secara sepihak oleh tim pengabdian. Diperlukan proses perencanaan yang berangkat dari pemahaman mendalam terhadap kondisi riil, kebutuhan, dan prioritas yang dirasakan langsung oleh anggota KWT sebagai pemilik masalah. Pendekatan pembangunan yang bersifat *top-down* cenderung menghasilkan intervensi yang kurang tepat sasaran dan sulit berkelanjutan karena minimnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap program (Bardosh et al., 2017; Mansuri & Rao, 2013; Suhara et al., 2025). Sebaliknya, pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat sejak tahap identifikasi masalah terbukti mampu meningkatkan efektivitas maupun keberlanjutan program pemberdayaan, sebagaimana ditunjukkan pada berbagai kegiatan pengabdian berbasis kelompok tani sebelumnya (Budiyoko et al., 2025; Zulkifli et al., 2025).

Salah satu pendekatan yang relevan digunakan untuk merancang kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah *participatory rural appraisal* (PRA). PRA merupakan pendekatan yang menempatkan masyarakat setempat bukan sebagai objek penerima program, melainkan sebagai subjek yang aktif menganalisis kondisi, menggali potensi, dan merumuskan kebutuhan mereka sendiri, dengan tim pengabdian berperan sebagai fasilitator (Chambers, 1994, 2003). Melalui teknik-teknik seperti diskusi kelompok terfokus, pemetaan masalah, dan penelusuran proses produksi bersama anggota kelompok, PRA memungkinkan tim pengabdian menggali informasi yang lebih akurat mengenai akar persoalan yang dihadapi mitra, sekaligus membangun kesepahaman bersama mengenai solusi yang akan diterapkan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa keberhasilan alih teknologi tepat guna sangat ditentukan oleh sejauh mana teknologi tersebut sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, dan konteks sosial masyarakat penerima manfaat (Al Fatih, 2025; Blohmke, 2014).

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada KWT Subur Makmur, tahap perencanaan diawali dengan sosialisasi dan koordinasi bersama anggota KWT, perangkat desa, dan penyuluh pertanian untuk menyamakan persepsi serta mengidentifikasi permasalahan secara bersama-sama. Proses ini menjadi dasar bagi perumusan intervensi kegiatan dan paket teknologi tepat guna yang menjadi bagian dari solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, penerapan PRA pada tahap perencanaan diharapkan dapat menghasilkan rancangan kegiatan yang lebih tepat sasaran, mudah diterima, dan berpeluang besar untuk berlanjut secara mandiri oleh KWT Subur Makmur setelah program pengabdian berakhir.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan pendekatan PRA dalam proses perencanaan kegiatan peningkatan daya saing keripik sagu tempe pada KWT Subur Makmur,

mulai dari tahap identifikasi masalah, penggalan kebutuhan, hingga perumusan solusi bersama mitra. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai bagaimana pendekatan partisipatif berkontribusi terhadap ketepatan rancangan intervensi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis kelompok usaha perempuan di perdesaan.

A. Analisis Situasi Dan Permasalahan Mitra

KWT Subur Makmur merupakan kelompok perempuan di Desa Jatisaba, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, yang mengembangkan kegiatan usaha pengolahan pangan berbasis potensi lokal. Salah satu produk yang dikembangkan oleh kelompok ini adalah keripik sagu tempe, yaitu produk olahan berbahan dasar sagu singkong dan tempe yang telah dikenal sebagai salah satu produk pangan khas desa. Pengembangan keripik sagu tempe tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi anggota kelompok, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan upaya Desa Jatisaba dalam mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal. Terkait hal tersebut, KWT Subur Makmur memiliki peluang untuk mengembangkan usaha secara lebih luas apabila didukung oleh kapasitas produksi, mutu produk, legalitas, dan strategi pemasaran yang memadai.

Berdasarkan hasil observasi awal, KWT Subur Makmur telah memiliki modal awal yang cukup penting untuk pengembangan usaha. Kelompok telah memiliki produk yang relatif spesifik dan berbasis bahan baku lokal, serta pengalaman dalam melakukan proses pengolahan dan pemasaran produk. Keripik sagu tempe juga memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai produk unggulan desa karena memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan identitas pangan lokal. Adanya dukungan dari pemerintah desa dan keterlibatan penyuluh pertanian menjadi potensi lain yang dapat mendukung proses pengembangan kelompok. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi mitra tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan menghasilkan produk, tetapi lebih pada bagaimana kapasitas usaha yang telah dimiliki dapat diperkuat agar mampu memenuhi tuntutan produksi, mutu, legalitas, dan pemasaran yang lebih luas.



Gambar 1. Pemotongan Tempe secara Manual (A); Hasil Potongan Keripik Sagu Tempe (B); Kemasan Keripik Sagu Tempe (C)

Hasil observasi menunjukkan bahwa proses produksi keripik sagu tempe masih dilakukan secara manual dengan menggunakan peralatan sederhana. Pemotongan bahan, penggorengan, penirisan minyak, dan pengemasan dilakukan dengan keterlibatan tenaga anggota kelompok secara langsung. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membatasi kapasitas produksi dan berpotensi menyebabkan inkonsistensi hasil. Pada tahap pemotongan, misalnya, penggunaan alat sederhana menyebabkan ketebalan irisan belum selalu seragam. Sementara itu, penggunaan peralatan penggorengan dengan kapasitas terbatas dan proses penirisan minyak secara konvensional membuat proses produksi membutuhkan waktu dan tenaga yang relatif besar. Dari penelusuran alur produksi bersama anggota KWT, terlihat bahwa persoalan kapasitas produksi tidak berdiri pada satu tahapan saja, tetapi berkaitan dengan beberapa titik proses yang saling berhubungan, mulai dari pemotongan hingga pengemasan.

Selain persoalan teknis produksi, hasil diskusi juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat aspek mutu dan kelembagaan usaha. Selama ini, konsistensi produk masih banyak bergantung pada pengalaman dan keterampilan anggota yang terlibat dalam proses produksi. Prosedur produksi belum sepenuhnya dituangkan dalam standar operasional yang dapat digunakan secara bersama-sama, sementara pemahaman mengenai praktik keamanan pangan juga masih perlu diperkuat. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pengembangan kapasitas produksi perlu diikuti dengan kemampuan menjaga mutu dan keamanan produk secara konsisten. Pada tahap perencanaan, kebutuhan terhadap pendampingan legalitas produk, termasuk sertifikasi halal dan perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), juga muncul dalam diskusi sebagai salah satu aspek yang perlu dipersiapkan untuk mendukung perluasan akses pasar.

Permasalahan lain yang teridentifikasi berkaitan dengan kemasan dan identitas produk. Kemasan yang digunakan masih lebih banyak berfungsi sebagai pembungkus dan belum sepenuhnya mencerminkan

identitas produk maupun identitas Desa Jatisaba sebagai wilayah asal produk. Label dan identitas visual yang belum kuat juga menjadi salah satu pertimbangan dalam upaya memperluas pemasaran. Bagi KWT, pengembangan kemasan tidak hanya dipandang sebagai persoalan tampilan produk, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan produk untuk dikenali dan dibedakan dari produk sejenis. Dalam konteks pengembangan produk unggulan desa, aspek tersebut menjadi relevan karena identitas produk dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat keterkaitan antara produk dan wilayah asalnya.

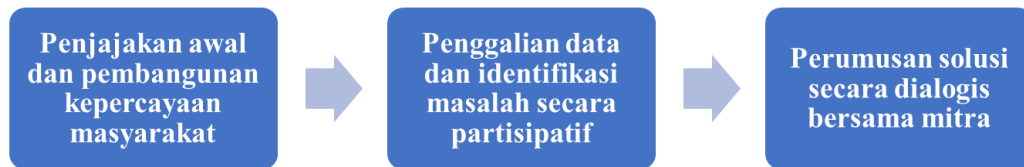
Hasil analisis situasi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi KWT Subur Makmur memiliki keterkaitan satu sama lain. Keterbatasan peralatan berhubungan dengan kapasitas produksi dan efisiensi proses, sedangkan peningkatan kapasitas produksi perlu diikuti dengan penguatan standardisasi, keamanan pangan, dan legalitas agar produk dapat dikembangkan secara lebih terarah. Pada saat yang sama, peningkatan kualitas produk dan kapasitas produksi perlu didukung oleh kemasan serta identitas merek yang mampu memperkuat daya tarik produk di pasar. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan tidak diarahkan pada satu bentuk intervensi tunggal, tetapi dipertimbangkan sebagai rangkaian kebutuhan yang saling melengkapi.

II. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan bersama Kelompok Wanita Tani (KWT) Subur Makmur di Desa Jatisaba, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, dengan fokus pada tahap perencanaan kegiatan peningkatan daya saing produk keripik sagu tempe. Tahap perencanaan ini melibatkan empat unsur, yaitu tim pengabdian, anggota dan pengurus KWT Subur Makmur, perangkat Pemerintah Desa Jatisaba, serta penyuluh pertanian lapangan (PPL) dari Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga. Keterlibatan keempat unsur tersebut dimaksudkan agar proses identifikasi masalah dan perumusan solusi tidak hanya mencerminkan sudut pandang akademisi, tetapi juga mengakomodasi perspektif pemerintah desa sebagai pemangku kepentingan pembangunan lokal, PPL sebagai pihak yang memahami kondisi teknis kelompok tani, serta anggota KWT sebagai pihak yang paling memahami persoalan usahanya sehari-hari.

Tahap perencanaan kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan PRA, yaitu pendekatan yang menempatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal sebagai mitra sejajar tim pengabdian dalam menggali persoalan, menganalisis kondisi, dan merumuskan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi sendiri (Chambers, 1994, 2003). Pendekatan ini dipilih dengan pertimbangan bahwa proses identifikasi masalah dan perumusan solusi yang dilakukan secara sepihak oleh tim pengabdian berisiko menghasilkan rancangan kegiatan yang kurang tepat sasaran dan sulit diterima oleh masyarakat (Rachmah et al., 2024; Zulkifli et al., 2025), sementara proses yang dibangun secara dialogis sejak awal akan lebih mudah menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki (*sense of belonging*) masyarakat terhadap kegiatan yang direncanakan (Darwanto et al., 2025; Suhara et al., 2025). Dalam kerangka ini, tim pengabdian memosisikan diri sebagai fasilitator yang memandu proses diskusi, bukan sebagai pihak yang menentukan permasalahan dan solusi secara sepihak, sehingga setiap keputusan yang dihasilkan pada tahap perencanaan merupakan kesepakatan bersama antara tim pengabdian dan mitra.

Implementasi PRA pada tahap perencanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan yang saling berkesinambungan, yaitu penjajakan awal dan pembangunan kepercayaan, penggalan data dan identifikasi masalah secara partisipatif, serta perumusan solusi secara dialogis bersama mitra (Gambar 2). Penjajakan awal dan pembangunan kepercayaan (*rapport building*) dilakukan melalui kunjungan lapangan dan pertemuan informal tim pengabdian bersama pengurus KWT Subur Makmur, perangkat Desa Jatisaba, dan PPL. Tahap ini bertujuan membangun kedekatan dan kepercayaan antara tim pengabdian dan mitra, sekaligus melakukan pengamatan awal terhadap kondisi produksi keripik sagu tempe yang berjalan selama ini. Tim pengabdian juga mengamati kondisi tempat produksi, peralatan yang digunakan, alur produksi, dan keterlibatan anggota dalam kegiatan usaha. Pengamatan tersebut menjadi bahan awal untuk memahami konteks usaha yang dilakukan masyarakat sebelum dilakukan intervensi lebih lanjut (Mikkelsen, 2005). Proses komunikasi dilakukan secara terbuka agar anggota KWT dapat menyampaikan pengalaman dan persoalan yang mereka hadapi secara langsung.



Gambar 2. Tahapan Implementasi PRA dalam Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Selanjutnya, tim melakukan penggalian data dan identifikasi masalah secara partisipatif. Pada tahap ini, tim pengabdian memfasilitasi pertemuan terbuka di balai desa dan rumah ketua KWT Subur Makmur yang dihadiri anggota KWT Subur Makmur, perangkat desa, dan PPL untuk menyamakan persepsi mengenai kondisi usaha dan permasalahan yang dihadapi. Penggalian informasi dan data dilakukan melalui diskusi kelompok semi terstruktur, penelusuran alur produksi, dan pemeringkatan masalah (*problem ranking*). Proses penggalian data ini dirancang secara berlapis agar setiap permasalahan yang teridentifikasi dapat dikonfirmasi dari berbagai sumber dan sudut pandang, sekaligus memberi ruang yang lebih luas bagi anggota masyarakat untuk terlibat aktif menyuarakan persoalan yang mereka alami sendiri (Zunaidi, 2024).

Tahap ketiga adalah perumusan solusi secara dialogis bersama mitra. Berdasarkan permasalahan prioritas yang telah disepakati, tim pengabdian bersama anggota KWT, perangkat desa, dan PPL selanjutnya merumuskan alternatif solusi melalui forum diskusi lanjutan. Pada tahap ini, tim pengabdian menyampaikan beberapa pilihan teknologi dan bentuk pendampingan yang secara teknis memungkinkan untuk diterapkan, sementara anggota KWT memberikan masukan mengenai kesesuaian pilihan tersebut dengan kondisi riil di lapangan, seperti ketersediaan ruang produksi, daya listrik, dan kemampuan operasional anggota. Dengan dilibatkannya mitra sejak tahap perumusan solusi, setiap opsi yang disepakati merupakan hasil pertimbangan bersama, bukan keputusan yang diambil secara sepihak oleh tim pengabdian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Identifikasi Permasalahan secara Partisipatif

Proses perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan penggalian kondisi usaha keripik sagu tempe bersama anggota KWT Subur Makmur. Tahap ini penting karena permasalahan yang menjadi dasar kegiatan tidak ditentukan sepenuhnya oleh tim pengabdian, tetapi dibahas berdasarkan pengalaman anggota dalam menjalankan usaha sehari-hari. Melalui diskusi kelompok dan penelusuran alur produksi, anggota KWT diberi ruang untuk menjelaskan kendala yang mereka hadapi, sementara tim pengabdian membantu mengorganisasi informasi tersebut agar dapat dibahas secara bersama-sama. Dokumentasi kegiatan diskusi bersama anggota KWT Subur Makmur, Perangkat Desa Jatisaba, PPL Kabupaten Purbalingga untuk mengidentifikasi permasalahan secara partisipatif dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Identifikasi Permasalahan Partisipatif Bersama Anggota KWT Subur Makmur, Perangkat Desa, dan PPL (A dan B)

Hasil proses tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi KWT tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan peralatan produksi. Dari aspek produksi, diketahui bahwa kapasitas produksi keripik sagu tempe masih rendah akibat proses produksi yang sepenuhnya dilakukan secara manual dengan peralatan sederhana. Dalam FGD, anggota KWT menyampaikan bahwa proses pemotongan tempe menggunakan pisau *cutter* membutuhkan waktu lama dan menghasilkan ketebalan irisan yang tidak seragam, sementara proses penggorengan dengan wajan berukuran kecil dan penirisan minyak secara konvensional turut membatasi jumlah produksi yang dapat dihasilkan dalam sehari. Melalui penelusuran alur produksi bersama, tim pengabdian dan anggota KWT dapat memetakan titik-titik kritis yang menjadi sumber inefisiensi, yaitu pada tahap pemotongan, penggorengan, penirisan, dan pengemasan. Pemetaan dan penelusuran alur produksi bersama ini memberikan dasar yang lebih kontekstual untuk menentukan jenis dukungan teknologi yang perlu direncanakan.

Selanjutnya, kapasitas kelembagaan dan produksi KWT Subur Makmur dinilai belum cukup memadai untuk menjamin standar mutu, keamanan pangan, dan akses pasar formal. Dalam diskusi bersama PPL, terungkap bahwa anggota KWT selama ini mengandalkan keterampilan individu dalam menjaga konsistensi rasa dan kualitas produk, tanpa didukung standar operasional yang baku maupun pengetahuan mengenai praktik keamanan pangan yang memadai. Produk keripik sagu tempe juga belum memiliki sertifikasi halal maupun izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sehingga menyulitkan KWT untuk mengakses pasar yang lebih formal, termasuk peluang kerja sama dengan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi-Makan Bergizi Gratis (SPPG-MBG) dan pelaku UMKM oleh-oleh yang selama ini menunjukkan minat cukup tinggi terhadap produk tersebut, namun belum dapat dipenuhi karena keterbatasan kapasitas dan legalitas produk.

Dari sisi *branding* dan daya jual, produk yang dihasilkan dinilai masih kurang optimal karena kemasan yang digunakan masih sederhana dan belum memiliki identitas merek yang kuat. Anggota KWT sendiri mengakui bahwa kemasan yang digunakan selama ini sekadar berfungsi sebagai pembungkus, tanpa label atau identitas visual yang dapat membedakan produk mereka dari produk sejenis di pasaran. Perangkat desa turut menekankan pentingnya aspek ini mengingat keripik sagu tempe telah ditetapkan sebagai salah satu produk unggulan desa dalam kerangka kebijakan *one village one product* (OVOP), sehingga tampilan produk perlu mencerminkan identitas Desa Jatisaba secara lebih kuat.

b. Penetapan Permasalahan Prioritas secara Partisipatif

Berbagai masalah yang berhasil diidentifikasi melalui diskusi dan penelusuran alur produksi selanjutnya dibahas bersama untuk menentukan persoalan yang perlu diprioritaskan dalam perencanaan kegiatan pengabdian. Proses ini dilakukan menggunakan teknik *problem ranking*, yaitu pemeringkatan masalah berdasarkan pertimbangan bersama dari anggota KWT, tim pengabdian, pemerintah desa, dan PPL. Pemeringkatan digunakan sebagai alat bantu untuk memfasilitasi diskusi dan membangun kesepakatan, bukan sebagai pengukuran kuantitatif mengenai tingkat keparahan masalah.

Dalam proses pemeringkatan, setiap masalah dibahas dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu (1) tingkat pengaruh masalah terhadap kegiatan usaha, (2) urgensi untuk ditindaklanjuti, (3) kebutuhan yang dirasakan oleh mitra, dan (4) kesesuaian masalah dengan ruang lingkup kegiatan pengabdian yang akan direncanakan. Berdasarkan pembahasan tersebut, masalah yang dianggap memiliki pengaruh paling besar terhadap pengembangan usaha dan paling relevan untuk ditindaklanjuti ditempatkan sebagai prioritas yang lebih tinggi. Hasil pemeringkatan permasalahan disajikan pada Tabel 1, sedangkan dokumentasi proses dialogis penentuan permasalahan prioritas dan solusinya ditampilkan pada Gambar 3.

Tabel 1. Hasil *Problem Ranking*

No	Identifikasi Permasalahan	Kriteria Pemeringkatan				Prioritas
		Pengaruh terhadap Usaha	Urgensi Penanganan	Kebutuhan Mitra	Kesesuaian dengan Program	
1.	Kapasitas produksi terbatas akibat proses manual dan peralatan sederhana	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	1
2.	Kapasitas standardisasi, mutu, keamanan pangan, dan legalitas produk masih perlu diperkuat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	2
3.	Kemasan dan identitas merek	Sedang–	Sedang–Tinggi	Tinggi	Tinggi	3

No	Identifikasi Permasalahan	Kriteria Pemeringkatan				Prioritas
		Pengaruh terhadap Usaha	Urgensi Penanganan	Kebutuhan Mitra	Kesesuaian dengan Program	
	belum optimal	Tinggi				

Hasil *problem ranking* menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas produksi menjadi persoalan yang ditempatkan sebagai prioritas pertama. Anggota KWT Subur Makmur menilai bahwa proses produksi yang masih banyak dilakukan secara manual dan penggunaan peralatan sederhana membatasi kemampuan kelompok untuk meningkatkan jumlah produksi secara lebih efisien. Persoalan ini juga berkaitan dengan beberapa tahapan produksi sekaligus, terutama pemotongan, penggorengan, penirisan, dan pengemasan. Penggunaan peralatan otomatis dapat meningkatkan produktivitas produksi keripik yang dilakukan pelaku usaha mikro (Indrawati et al., 2021; Wijaya et al., 2025). Oleh karena itu, masalah kapasitas produksi dipandang sebagai kebutuhan awal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana kegiatan.



Gambar 4. Diskusi Partisipatif Penetapan Permasalahan Prioritas dan Solusi (A dan B)

Prioritas kedua berkaitan dengan kapasitas kelompok dalam menjaga standardisasi proses, mutu, keamanan pangan, dan legalitas produk. Aspek ini dipandang penting karena peningkatan kapasitas produksi perlu diikuti dengan kemampuan menjaga konsistensi dan keamanan produk. Selain itu, legalitas seperti sertifikasi halal dan PIRT dipandang sebagai bagian yang perlu dipersiapkan untuk mendukung peluang pengembangan pasar (Nasori et al., 2022). Dengan demikian, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga dengan kesiapan kelompok dalam mengelola usaha pangan secara lebih terstandar.

Sementara itu, persoalan kemasan dan identitas merek produk ditempatkan sebagai prioritas ketiga. Meskipun tidak dianggap sebagai kendala yang paling mendesak dibandingkan persoalan produksi dan standardisasi, anggota KWT Subur Makmur dan pemerintah desa memandang bahwa aspek ini tetap penting untuk mendukung pengembangan produk. Kemasan dan identitas merek diperlukan agar keripik sagu tempe memiliki ciri yang lebih jelas dan dapat dikaitkan dengan identitas produk unggulan Desa Jatisaba. Penguatan kemasan dan identitas merek tidak hanya meningkatkan nilai estetika produk, tetapi juga membantu membangun diferensiasi dan citra produk di benak konsumen sehingga mendukung perluasan akses pasar (Muliamadnan et al., 2026; Rundh, 2016).

Hasil pemeringkatan tersebut menunjukkan bahwa penetapan prioritas tidak semata-mata didasarkan pada satu jenis masalah, tetapi mempertimbangkan keterkaitan antara kebutuhan teknis produksi, kesiapan usaha, dan peluang pengembangan produk. Keterbatasan produksi ditempatkan sebagai prioritas awal karena berhubungan langsung dengan kemampuan kelompok dalam memenuhi permintaan, sementara penguatan mutu, keamanan pangan, dan legalitas dipandang sebagai prasyarat yang perlu berjalan bersamaan. Adapun penguatan kemasan dan *branding* direncanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi produk setelah aspek produksi dan kesiapan usaha mulai diperbaiki.

Proses *problem ranking* juga memperlihatkan fungsi PRA sebagai ruang untuk menyusun prioritas berdasarkan pengalaman dan pertimbangan masyarakat, bukan sekadar berdasarkan diagnosis awal tim pengabdian. Anggota KWT dapat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi secara langsung, sedangkan tim pengabdian, pemerintah desa, dan PPL memberikan perspektif tambahan dalam membahas konsekuensi

dan kemungkinan penanganannya. Tiga permasalahan prioritas yang ditetapkan tidak dimaksudkan sebagai gambaran seluruh persoalan yang dihadapi KWT Subur Makmur, melainkan sebagai masalah yang disepakati untuk menjadi fokus perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Masalah lain yang mungkin muncul dalam proses diskusi tetap menjadi bagian dari konteks pengembangan kelompok, tetapi belum menjadi fokus intervensi yang direncanakan dalam program pengabdian ini. Pembatasan prioritas tersebut diperlukan agar rancangan kegiatan tetap realistis dan sesuai dengan sumber daya serta ruang lingkup program yang tersedia.

c. Perumusan Solusi secara Partisipatif

Setelah masalah prioritas disepakati, proses perencanaan dilanjutkan dengan membahas alternatif solusi. Pada tahap ini, tim pengabdian menyampaikan beberapa pilihan bentuk intervensi yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan, sedangkan anggota KWT memberikan masukan mengenai kesesuaiannya dengan kondisi usaha. Dengan demikian, solusi yang direncanakan tidak hanya mempertimbangkan kemampuan teknis suatu teknologi atau bentuk pendampingan, tetapi juga kondisi operasional yang dihadapi mitra.

Untuk mengatasi keterbatasan kapasitas produksi, direncanakan penerapan paket teknologi tepat guna yang mencakup alat pemotong semi otomatis, alat penggoreng berkapasitas lebih besar, kompor, *spinner* peniris minyak, dan alat pengemasan. Pemilihan paket tersebut didasarkan pada hasil penelusuran alur produksi yang menunjukkan bahwa beberapa tahapan menjadi titik yang membutuhkan waktu dan tenaga cukup besar. Penggunaan beberapa alat secara terpadu direncanakan untuk mendukung tahapan produksi yang dianggap prioritas.

Pada aspek mutu dan kelembagaan, solusi yang direncanakan meliputi pelatihan dan pendampingan mengenai standarisasi proses produksi, keamanan pangan, serta pengurusan legalitas produk, termasuk sertifikasi halal dan PIRT. Perencanaan ini didasarkan pada kesadaran bersama bahwa peningkatan kapasitas produksi perlu diikuti dengan penguatan kemampuan kelompok dalam menjaga mutu dan memenuhi persyaratan produk (Kusumandari et al., 2024). Pendampingan juga direncanakan untuk membantu mitra memahami tahapan yang perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan legalitas produk.

Sementara itu, untuk menjawab persoalan kemasan dan identitas produk, direncanakan pendampingan dalam pengembangan desain kemasan, label, dan *branding* keripik sagu tempe. Solusi ini dibahas sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas produk dan menghubungkannya dengan posisi keripik sagu tempe sebagai salah satu produk unggulan Desa Jatisaba. Bentuk desain dan identitas produk selanjutnya akan dikembangkan pada tahap implementasi dengan mempertimbangkan masukan dari anggota KWT Subur Makmur dan karakteristik produk yang telah ada. Identifikasi permasalahan prioritas dan solusinya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Permasalahan Prioritas dan Rencana Solusi Hasil Perencanaan Partisipatif

No	Permasalahan Prioritas	Rencana Solusi
1	Kapasitas produksi terbatas karena proses manual dan peralatan sederhana	Penerapan paket teknologi tepat guna berupa alat pemotong semiotomatis, alat penggoreng berkapasitas lebih besar dan kompor, <i>spinner</i> peniris minyak, serta alat pengemasan
2	Kapasitas kelompok dalam standarisasi, mutu, keamanan pangan, dan legalitas produk masih perlu diperkuat	Pelatihan dan pendampingan standarisasi proses produksi, keamanan pangan, serta pengurusan sertifikasi halal dan PIRT
3	Kemasan dan identitas merek belum optimal	Pendampingan pengembangan kemasan, label, dan <i>branding</i> produk

Proses perencanaan yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan PRA memberikan ruang bagi mitra untuk terlibat dalam mendefinisikan masalah dan membahas alternatif solusi. Nilai penting dari proses ini bukan hanya terletak pada keterlibatan masyarakat dalam forum diskusi, tetapi pada upaya menghubungkan pengalaman praktis anggota masyarakat (KWT Subur Makmur) dengan pertimbangan teknis yang dibawa oleh tim pengabdian (Zulkifli et al., 2025). Dengan demikian, pengetahuan mengenai kondisi usaha yang dimiliki oleh mitra menjadi bagian dari dasar penyusunan rencana kegiatan.

Implementasi pendekatan PRA dalam tahap pra-kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi mekanisme untuk mempertemukan tiga unsur dalam perencanaan, yaitu kebutuhan dan pengalaman mitra, pertimbangan teknis tim pengabdian, serta dukungan dan konteks kelembagaan lokal. Pertemuan ketiga unsur

tersebut menghasilkan rancangan awal kegiatan yang lebih terarah dan menjadi dasar untuk tahap implementasi selanjutnya. Selain itu, proses PRA ini digunakan untuk menyusun prioritas masalah dan rancangan solusi secara partisipatif sebelum intervensi dilaksanakan. Pelaksanaan dan evaluasi terhadap solusi yang direncanakan, yaitu transfer ipteks melalui penerapan teknologi tepat guna, pelatihan, pendampingan standardisasi dan legalitas produk, serta penguatan kemasan dan *branding*, menjadi tahap lanjutan yang diperlukan untuk melihat kesesuaian rancangan dengan kondisi aktual serta perubahan yang terjadi pada mitra setelah program dilaksanakan.

IV. KESIMPULAN

Penerapan pendekatan *participatory rural appraisal* dalam tahap perencanaan kegiatan peningkatan daya saing keripik sagu tempe pada KWT Subur Makmur menunjukkan bahwa proses identifikasi masalah dan perumusan solusi yang dilakukan secara partisipatif, melibatkan tim pengabdian, anggota KWT, pemerintah desa, dan penyuluh pertanian lapangan, mampu menghasilkan rumusan permasalahan yang kontekstual sekaligus solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas mitra. Melalui proses *problem ranking*, tiga masalah ditetapkan sebagai prioritas, yaitu keterbatasan kapasitas produksi akibat proses manual dan peralatan sederhana, perlunya penguatan standardisasi, mutu, keamanan pangan dan legalitas produk, serta belum optimalnya kemasan dan identitas merek. Hasil utama dari tahap pra-kegiatan ini bukan berupa perubahan langsung pada kondisi usaha, melainkan tersusunnya rancangan intervensi yang disesuaikan dengan masalah dan kebutuhan yang telah dibahas bersama. Rencana kegiatan mencakup penerapan teknologi tepat guna untuk mendukung proses produksi, pelatihan dan pendampingan terkait standardisasi, keamanan pangan dan legalitas produk, serta pengembangan kemasan dan identitas merek. Pendekatan PRA membantu memastikan bahwa rancangan tersebut disusun berdasarkan pengalaman dan kebutuhan mitra, dengan mempertimbangkan masukan teknis dari tim pengabdian dan konteks kelembagaan lokal.

Sebagai tindak lanjut, tahap berikutnya adalah melaksanakan intervensi yang telah direncanakan secara bertahap bersama KWT Subur Makmur. Kegiatan tersebut meliputi penerapan dan pendampingan penggunaan teknologi tepat guna, penguatan kapasitas anggota dalam standardisasi dan keamanan pangan, pendampingan proses legalitas produk, serta pengembangan kemasan dan identitas merek. Setelah implementasi dilakukan, diperlukan pendampingan lanjutan untuk melihat kesesuaian solusi dengan kondisi mitra dan mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian. Evaluasi pada tahap selanjutnya juga diperlukan untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada proses produksi, kapasitas kelompok, mutu produk, dan aspek pengembangan usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didukung oleh pendanaan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikristek) melalui Skema Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat Tahun Anggaran 2026, dengan No Kontrak B/2266/UN23.18/PM.01.01/2026. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kemendikristek, LPPM Universitas Jenderal Soedirman, Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Desa Jatisaba dan para pihak yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fatih, M. G. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi Tepat Guna dalam Kegiatan Pengabdian. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 1(1).
- Bardosh, K. L., Ryan, S. J., Ebi, K., Welburn, S., & Singer, B. (2017). Addressing vulnerability, building resilience: Community-based adaptation to vector-borne diseases in the context of global change. *Infectious Diseases of Poverty*, 6(1), 166. <https://doi.org/10.1186/s40249-017-0375-2>
- Blohmke, J. (2014). Technology complexity, technology transfer mechanisms and sustainable development. *Energy for Sustainable Development*, 23, 237–246. <https://doi.org/10.1016/j.esd.2014.09.003>
- Budiyoko, B., Zulkifli, L., Priambodo, T. R., Syamsi, A. N., Rachmah, M. A., Hidayat, A. W., Prasetya, E. D. H., & Hidayat, Y. N. (2025). Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani melalui Inovasi Silase Kulit Nanas Berbasis Ekonomi Sirkular di Desa Karangjengkol. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 5(5). <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i5.2026>

- Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Challenges, potentials and paradigm. *World Development*, 22(10), 1437–1454. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90030-2](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90030-2)
- Chambers, R. (2003). *Rural development: Putting the last first* (23. Repr). Pearson Education Ltd.
- Darwanto, A., Prahmana, R. C. I., & Susanti, A. (2025). *Partnership Community-Based Management Model*. Trussmedia Grafika.
- Indrawati, R. T., Putri, F. T., Rochmatika, R. A., & Prawibowo, H. (2021). Peningkatan Kapasitas Produksi melalui Rancang Bangun Mesin Semi Otomatis Pemotong Adonan Kerupuk. *Jurnal Rekayasa Mesin*, 16(3), 437. <https://doi.org/10.32497/jrm.v16i3.3072>
- Kemenkop UKM, & Japan ASEAN Cooperation. (2014). *Improvement Rural Living Condition Through One Village One Product (OVOP) Movement*. Kementerian Koperasi dan UKM.
- Kusumandari, R. B., Faturrohman, H., Kusumaningtyas, N., Nisak, S. H., & Solikhah, N. P. (2024). Pengembangan Kapasitas Produksi dan Diversifikasi Produk Jamu Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM Di Gununggajah Kabupaten Klaten. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 346–352. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i2.1602>
- Mansuri, G., & Rao, V. (2013). Can participation be induced? Some evidence from developing countries¹. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 16(2), 284–304. <https://doi.org/10.1080/13698230.2012.757918>
- Mikkelsen, B. (2005). *Methods for Development Work and Research: A New Guide for Practitioners*. SAGE Publications India Pvt Ltd. <https://doi.org/10.4135/9788132108566>
- Muliaramadhan, H., Ash-Shiddiqi, A. T., Suwito, P., Fauzy, A. F., Sunendar, Yoko, B., Rachmah, A. R., & Zulkifli, L. (2026). Hilirisasi Teknologi Tepat Guna dan Penguatan Identitas Visual Produk Pada Pengrajin Keripik Kimpul di Desa Kemutug Lor. *Sevastra: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Nasori, N., Indrawati, S., Endarko, E., Mashuri, M., Prayitno, G., & Rubiyanto, A. (2022). Pemetaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024. *SEWAGATI*, 6(1), 76–84. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.172>
- Ningtyas, R., & Indah, H. (2022). Penguatan Optimalisasi BUMDes dengan Metode OVOP (One Village One Product) Sebagai Penggerak Pengembangan Perekonomian Desa. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(3), 381–394. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i3.383>
- Nurhalimah, W. S., & Damayanti, S. (2025). Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) Indah Lestari Di Desa Cibiru Wetan. *Prosiding Seri Praktikum Ilmu-Ilmu Sosial-Politik*, 2, 340-349.
- Rachmah, M. A., Budiyo, B., Sunendar, S., & Sriningsih, E. (2024). Penganekaragaman Sumber Nafkah Petani Sekitar Hutan Di Desa Kemutug Lor: Participatory Rural Appraisal. *Kirana: Jurnal Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian*, 5(1).
- Rundh, B. (2016). The role of packaging within marketing and value creation. *British Food Journal*, 118(10), 2491–2511. <https://doi.org/10.1108/BFJ-10-2015-0390>
- Soewito, S., Dunan, H., Redaputri, A. P., Barusman, T. M., Rinova, D., & Pienrasmi, H. (2022). Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (Kwt) Dalam Pemanfaatan Lahan Pekarangan Rumah Sebagai Sumber Pendapatan Tambahan Produk Hasil Pertanian Pada Kelompok Tani Melati Desa Bumi Sari Natar Lampung Selatan. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.36448/jpu.v1i1.4>
- Suhara, A., Mayasari, N., Azhari, M., Maqfirah, P. A., Sastraatmadja, A. H. M., Setiawan, N., Jauhar, N., & Sukwika, T. (2025). *Metode Pengabdian Kepada Masyarakat Teori dan Praktik*. Penerbit Widina Media Utama.
- Sunu, A. H., & Supartiwi. (2025). Analisis Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani Di Kabupaten Sleman (Studi Kasus: Kelompok Wanita Tani Karang Melati Kelurahan Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman). *Journal of Politic and Government Studies*, 14(1).
- Turmudi, H. (2025). Transplantasi Model One Village One Product (OVOP) Dalam Kebijakan Pembangunan Desa di Indonesia. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum*, 2(4), 358–365. <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i4.1190>
- Wijaya, H. S., Anggraini, S. P. A., & Indana, L. (2025). Inovasi Alat Perajang Otomatis sebagai Upaya Peningkatan Produktivitas Usaha Keripik Singkong di Kelurahan Jedong. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 10(2). <https://doi.org/10.21067/jpm.v10i2.12908>
- Zulkifli, L., Rachmah, M. A., Ilma, A. F. N., & Budiyo, B. (2025). Participatory Rural Appraisal Dalam Perancangan Kegiatan Budidaya Padi Organik Di Kelurahan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(1), 1088–1095. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i1.5389>
- Zulkifli, L., Setyaningrum, A., Rachmah, M. A., & Budiyo, B. (2025). Membangun Kompetensi Petani Padi melalui Pelatihan Partisipatif dalam Produksi Pupuk Organik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 5(5). <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i5.2036>
- Zunaidi, A. (2024). *Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat Pendekatan Praktis Untuk Memberdayakan Komunitas*. Yayasan Putra Adi Dharma.